

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Muhammad Giftah Raunaqy¹⁾, Norsanti²⁾, Sitna Hajar Malawat³⁾

¹⁾Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, 19120049

²⁾Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, 0019098201

³⁾Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, 1113059101

Email: giftahraunaqy@gmail.com

ABSTRAK

Muhammad Giftah Raunaqy, NPM. 19.12.0049 “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah” Bimbingan Ibu Norsanti sebagai Pembimbing Pertama dan Ibu Sitna Hajar Malawat sebagai Pembimbing Kedua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet serta kendala yang terjadi pada saat proses implementasi kebijakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif data dikumpulkan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi yang dilakukan kepada empat orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive Analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sudah berjalan dengan baik, serta pada pelaksanaannya sudah terbilang baik, dengan pemahaman kebijakan dari implementor yang sudah menguasai, serta dari wajib pajak yang bersedia dalam membayar pajak sarang burung waletnya sehingga mendukung capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala. Adapun kendala yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet tersebut adalah tentang kurangnya sumberdaya seperti anggaran ataupun tenaga ahli dari pihak implementor, serta dari wajib pajak atau pengusaha sarang burung yang terkendala panen yang tidak menentu, pemahaman kebijakan yang masih kurang, serta kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak sarang burung walet.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Pajak Sarang Burung Walet

Referensi

- Alamsyah Kamal. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung. Media Citra Mandiri Press.
- Deddy Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Leo Agustino. (2019) & (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Mustari Nuryanti. (2015). *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. LeutikaPrio.
- Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNISKA MAB 2022
- Sahya Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia Bandung
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Bupati Barito Kuala No. 40 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
- Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572.
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Fachrizon, F. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 1-7.
- FITRIYANI,N.(2020). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di KabupatenRokan Hilir* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- LESTARI, I. P. (2018). *POTENSI DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- NIM, R. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari, W. (2022). PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83-102.
- Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S. T., & Fatimah, A. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *PERSPEKTIF*, 9(2), 397